

**ANALISIS YURIDIS BELUM ADANYA PERATURAN PELAKSANA DARI
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN
TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
KABUPATEN ENDE**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**



OLEH :

**MUHAMAD FIORI SUWETTY
NIM : 2016111011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS FLORES
ENDE**

202

LEMBARAN PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS BELUM ADANYA PERATURAN BUPATI DARI
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG
PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI
LIMA DI KABUPATEN ENDE

SKRIPSI

Disusun Oleh :

MUHAMAD FIORI SUWETTY

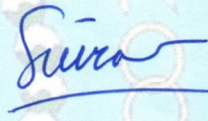
NIM : 2016110898

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

DISETUJUI

Pembimbing I

Pembimbing II



BERNADUS BASA KELEN, S.H., M.Hum

SUMIRAHAYU SULAIMAN, S.H., M.Hum

NIDN : 0814077102

NIDN: 0801028602

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Flores

PAEKINUS SEDA, S.H., M.H
NIDN : 0830067701



Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores

CHRISTINA BAGENDA, S.H., M.H
NIDN: 0823036701

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS BELUM ADANYA PERATURAN PELAKSANA DARI
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN
TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI
KABUPATEN ENDE**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Penguji

Pada Hari : Senin

Tanggal : 15 Januari 2021

Tim Penguji

1. Christiana Sri Murni, S.H.,M.Hum (Ketua) 1. 
2. Christina Bagenda, S.H.,M.H (Sekretaris) 2. 
3. Yohanes Pande, S.H.,M.H (Anggota) 3. 
4. Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum (Anggota) 4. 
5. Bernadus Basa Kelen, S.H.,M.Hum (Anggota) 5. 

MENGESAHKAN



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MUHAMAD FIQRI SUWETTY

Nim : 2016111011

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi ANALISIS YURIDIS BELUM ADANYA PERATURAN BUPATI DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN ENDE

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya siap menerima sangsi atas perbuatan saya.

Ende, Februari 2021

Penulis



Muhamad Fiqri Suwetty
NIM : 2016111011

MOTTO

(Perincian Norma Hukum Harus Diperinci Dengan Tegas)

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk :

1. Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bapak Haris Suwetty (Alm) dan Mama Siti Dharmawia R, yang dengan hati yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih telah dengan susah payah, melahirkan, membesarkan, membimbing, mendidik dan membiayai penulis.
3. Kakak dan adik tercinta, Fitria Ningsih Suwetty, Iwan Juanda Suwetty, yang telah mendukung penulis lewat Doa demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan; Fakultas Hukum Angkatan 2016, yang dengan cara mereka masing-masing telah membantu dan mendukung penulis dengan penuh kesetiakawanan dan selalu menantikan keberhasilan penulis.
5. Almamaterku tercinta Universitas Flores.
6. Bangsa dan Tanah Air Indonesia.

ABSTRAK

Judul skripsi ini adalah “Analisis Yuridis Belum Adanya Peraturan Bupati Dari Peraturan Daerah Kabupaten Ende Tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Ende.” Disusun Oleh Muhamad Fiqri Suwetty, NIM : 2016 111 011.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis yuridis belum adanya aturan Bupati dari Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 tahun 2005 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima di kabupaten ende serta apakah secara yuridis Peraturan Daerah Kabupaten ende nomor 3 tahun 2005 tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan Pedagang Kaki lima dapat diterapkan di Kabupaten Ende jika Peraturan Bupati belum ada.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normative dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: Pemerintah Daerah Kabupaten Ende telah membuat payung hukum untuk mengatur tempat usaha dan pedagang kaki lima yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam rangka penataan Pasar di Kabupaten Ende. Pemerintah Kabupaten Ende telah mengeluarkan Peraturan Daerah tersebut dengan tujuan mewujudkan keindahan dan ketertiban kota tanpa mengurangi kepentingan dan hak ekonomi, sosial, budaya serta pelaku pedagang kaki lima itu sendiri. Dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 tahun 2005 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima menyebutkan bahwa “Para pedagang kaki lima dilarang untuk berjualan atau berdagang di badan jalan, drainase, emperan toko, trotoar, halte, terminal, tempat parkir dan tempat- tempat lain selain yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati”. Selanjutnya, Pasal 2, 3 dan 9 mengamanatkannya dibentuknya Peraturan Bupati. Namun saat ini Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima belum dibentuk atau dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ende sehingga dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan penegakan hukum dilapangan. kesimpulan dari penelitian ini adalah : Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah dengan jelas menerangkan tentang atas kuasa Undang-Undang maka Kepala Daerah menetapkan Perkada sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Daerah yang ada. Yang terjadi di Wilayah Kota Ende justru sebaliknya. Peraturan Daerah tersebut dapat dikatakan tidak dapat diterapkan jika yang diundangkan di dalam Peraturan Daerah tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam Peraturan Bupati. Jika peraturan tersebut berjalan tanpa adanya aturan pelaksana dari Peraturan Daerah maka akan terjadi kekosongan hukum.

Kata Kunci : Peraturan Bupati, Peraturan Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

The thesis title is “Yuridis analysis had not yet provided a regnal rule of ende county county for the management of a five-foot merchant and merchant builder in Ende county”. Composed by Muhamad Fiqri Suwetty, NIM : 2016 111 011.

The formulation of the problem in this study is How does a juxie analysis not yet show a regent rule of the 2005 ende county regency for the management of a five-foot dealer and merchant building in ende county and whether ende county by law no. 3 year 2005 on the management of businesses and five-foot merchants could be applied in ende county if the regency hadn't already existed.

The method of research used in the in this study is normative, a process where by legal rules, principles of law, and legal doctrines are found to answer legal issues faced. The study of the normative law is done to produce new arguments, theories or concepts and solve problems faced.

The study suggests that ende county governments have made a legal umbrella for managing businesses and 55-year-old ordinance (ordinance) of the area (provision) number 3 of 2005 for the management of businesses and the development of street traders in ende district. The government of ende has issued an ordinance of the area in order to realize the beauty and order of the city without reducing the economic, social, cultural and cultural interests and tradesmen themselves. In article 5 of ende county's 2005 regregary rule no. 3 regarding the arrangement of businesses and the establishment of street hawkermen, drainage, storefronts, sidewalks, shelters, terminals, parking and other places apart from the regents' regulations. Futher, chapters 23, and 9 secure the form of the regents' rue. However, the regent's rule as the executional rule of area number 3 year 2005 on the management of businesses and the construction of street hawkermen has not been established or created by the state government of ende so that it can prevent enforcement of public law enforcement. The conclusion of this study is: article 246 verse (1) act number 23 in 2014 on local governments has clearly explained on the statute of rights that the head of the region sets up as the executional rule of existing tribal laws. Ende is the exact opposite. The state ordinance could be said to be unapplicable if the terms of the territory were not further explained in the regents' regulations. If the regulation runs without the rules of the region it becomes a law vacuum.

Keywords : Regent's rule, 2005 rule number 3 on the management of businesses and five-foot merchants

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya yang berlimpah sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “ANALISIS YURIDIS BELUM ADANYA PERATURAN BUPATI DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN ENDE”.

Tulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas-tugas dalam memenuhi syarat-syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Universitas Flores. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa didalam tulisan skripsi ini masih banyak dijumpai kekurangan-kekurangan serta masih jauh dari kesempurnaan. Namun dengan berbekal pada ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan berbekal keyakinan pada suatu tujuan yang ingin dicapai serta didorong oleh bantuan dari semua pihak, maka tulisan inipun dapat terselesaikan.

Oleh karena itu Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas segala bimbingan dan motivasi serta saran-saran yang telah diberikan sehingga Penulis dapat sampai pada tersempurnanya tulisan ini.

Rasa terima kasih yang mendalam Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Simon Sira Padji, M.A selaku Rektor Universitas Flores yang telah memberikan Pengaruh besar demi perkembangan pendidikan di Universitas Flores.

2. Bapak Paulinus Seda, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Yohanes Pande, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Flores yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum selaku Sekretaris Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Bernadus Basa Kelen, S.H., M.Hum sebagai dosen Pembimbing I, yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum sebagai dosen pembimbing II, yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, memberikan motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam proses bimbingan skripsi ini.
8. Bapak Fransiskus Badhe, S.H., M.H sebagai dosen Pembimbing Akademik, yang juga selalu memberikan masukan serta motivasi kepada Penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Flores yang dengan caranya masing-masing telah memberikan dukungan, bantuan dan motivasi kepada peneliti selama melaksanakan studi di Universitas Flores.

Ende, Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Ruang Lingkup Masalah.....	10
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	11
1.6 Sistematika Penullisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Tentang Peraturan Daerah dan Pemerintahan Daerah.....	15
2.1.1 Pengertian Peraturan Daerah.....	15
2.1.2 Pendapat Para Ahli Tentang Peraturan Daerah.....	15

2.1.3	Pengertian Pemerintahan Daerah	16
2.1.4	Pendapat Para Ahli Tentang Pemerintah Daerah	17
2.1.5	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	17
2.1.6	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah	18
2.2	Tinjauan Tentang Aturan Pelaksana.....	19
2.2.1	Menurut Para Ahli Tentang Aturan Pelaksana	19
2.2.2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tetang Peraturan Perundang-Undangan.....	22
2.2.3	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	23
 BAB III ANALISIS YURIDIS BELUM ADANYA ATURAN BUPATI DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN ENDE		
		24
 BAB IV PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PENGATURAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA TANPA ADANYA PERATURAN BUPATI KABUPATEN ENDE SEBAGAI ATURAN PELAKSANANYA		
		38

BAB V PENUTUP.....	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN